

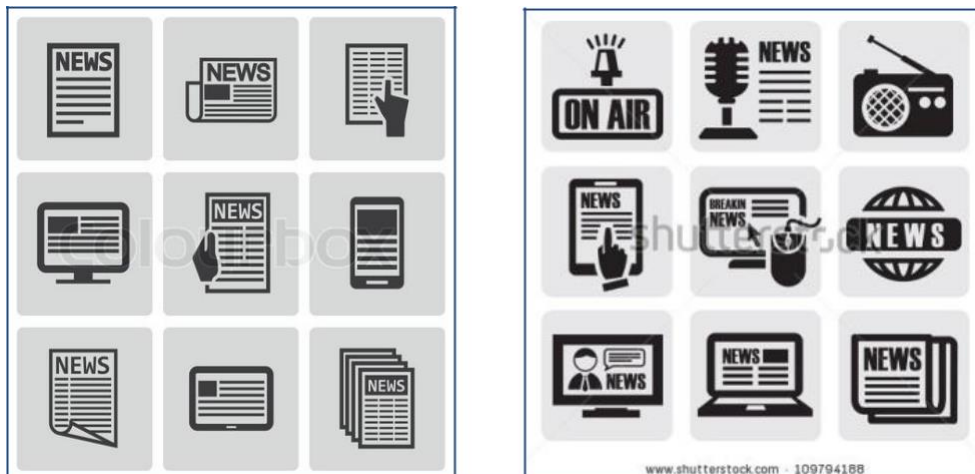


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Kliping Digital

Wilayah & Tata Ruang

Rabu, 5 Mei 2021



**Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Perpustakaan & Kearsipan
2021**

Daftar Isi

1. MUSRENBANGNAS 2021 JABARKAN STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL - *Media Online Kompas*
2. - *Media Online Media Indonesia*

MUSRENBANGNAS 2021 JABARKAN STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL

KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

5 Mei 2021



Presiden RI Joko Widodo ditempuh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monorafi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Pembukaan Musrenbangnas 2021 di Istana Merdeka, Selasa (4/5/2021).

Musrenbangnas 2021 Jabarkan Strategi Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang dihelat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKJP) 2022 bertema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Dalam Pembukaan Musrenbangnas 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Istana Merdeka dan Kementerian PPN/Bappenas, Presiden RI Joko Widodo menegaskan tiga hal yang menjadi pembelajaran bagi perencanaan pembangunan nasional di tengah pandemi Covid-19, yakni siap untuk lakukan perubahan secara cepat, responsif, dan berkeadilan untuk memecahkan masalah, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden juga mengemukakan perubahan ekonomi yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. "Perubahan ekonomi harus inklusif, harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah Sustainable Development Goals. Perubahan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah atau desa dan kota," tutur Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (4/5/2021).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monorafi menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi

struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi. "Kita perlu mempercepat aksi Covid-19 menuju herd immunity dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan melakukan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi," ujar Suharno yang didampingi Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. "Perubahan ekonomi harus inklusif, harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah Sustainable Development Goals. Perubahan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah atau desa dan kota," tutur Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (4/5/2021).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monorafi menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi

struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi. "Kita perlu mempercepat aksi Covid-19 menuju herd immunity dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan melakukan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi," ujar Suharno yang didampingi Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia. "Perubahan ekonomi harus inklusif, harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah Sustainable Development Goals. Perubahan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah atau desa dan kota," tutur Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (4/5/2021).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monorafi menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi

Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan enam strategi besar dalam Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia pasca Covid-19, yang menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai instrumen utama. Keenam strategi ini merupakan "game changer" untuk menuju Indonesia Maju sebelum 2045. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan rancangan Reta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia yang diharapkan akan selesai pada tahun ini.

"Dalam RKJP 2022, paling penting adalah pemulihan ekonomi dan diharapkan berlandaskan pada dua pilar utama. Pertama, pemulihan daya beli dan usaha yang dipengaruhi bagaimana Indonesia bisa mengatasi Covid-19. Kedua, pemulihan dunia usaha, meniga daya beli rumah tangga dan mempercepat pembangunan infrastruktur padat karya," ujar Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adhinger Widyarsari dalam sesi diskusi selepas arahan Presiden dan para menteri.

Dissuas dengan keadilan prinsip green recovery dan green economy yang inklusif dan berkelanjutan sesuai TPB-SDGs, Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia mengesamping enam strategi utama, yakni Strategi 1: Sumber Daya Manusia Berdaya. Strategi 2: Produktivitas Sektor Ekonomi, mencakup industri, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian; Strategi 3: Ekonomi Hijau, meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, dan transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca; Strategi 4: Transformasi Digital, terdiri atas infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enkabel; Strategi 5: Pemindehan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan pembenahan ekonomi antar wilayah; dan Strategi 6: Integrasi Ekonomi Domestik, meliputi otonomi pasar dengan fokus pada infrastruktur konektivitas serta domestik value chain.

Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sandjoko menambahkan, strategi pembangunan sektor kesehatan akan selalu berjalan seiring dengan upaya pemulihan sektor ekonomi. "Ada delapan area kunci reformasi sistem kesehatan, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan pusat kesehatan masyarakat atas pakuemas, peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, peningkatan farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, penyediaan kesehatan, serta teknologi informasi dan perencanaan masyarakat. "Kita berharap tahun

Percepatan Pembangunan Daerah 2021

Dalam Musrenbangnas 2021 yang juga dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah seluruh Indonesia, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta gubernur dan bupati/wali kota, Kementerian PPN/Bappenas mengemukakan Percepatan Pembangunan Daerah 2021. "Sebagai rangkain penguatan tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah seluruh Indonesia, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta gubernur dan bupati/wali kota, Kementerian PPN/Bappenas mengemukakan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) 2021, anggaran evakuasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai perencanaan dan Pincapaian Terleak di Tingkat Provinsi, dan kota.

Umum Perah PPD 2021 Kategori Perencanaan dan Pincapaian Terleak di Tingkat Provinsi, predikat terbaik pertama diraih Sumatera Barat, predikat terbaik kedua diraih Jawa Barat, sementara predikat terbaik ketiga diraih Bengkulu. Untuk kategori Perencanaan dan Pincapaian Terleak di Tingkat Kabupaten/Bangka, predikat terbaik kedua diraih Kabupaten Banggai, dan predikat terbaik ketiga diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara itu, untuk kategori Perencanaan dan Pincapaian Terleak di tingkat Kota, predikat terbaik pertama diraih Kota Semarang, predikat terbaik

kedua diraih Kota Padang, dan predikat terbaik ketiga diraih Kota Bandung. Program penerangan PPD 2021 dilakukan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju menjelang tahun 2022 sebagai tahun bangkit dari pandemi sekaligus fondasi menuju Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi," urai Suhardi.

"Sebagai rangkain penguatan tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah seluruh Indonesia, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta gubernur dan bupati/wali kota, Kementerian PPN/Bappenas mengemukakan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) 2021, anggaran evakuasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai perencanaan dan Pincapaian Terleak di Tingkat Provinsi, dan kota.



Suharno menyampaikan posisi 2022 sebagai tahun pemulihan dari pandemi Covid-19 dan menjadi landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.

Rabu, 5 Mei 2021

Belanja pemerintah harus dipercepat, terutama bantuan sosial dan program padat karya untuk menggerakkan perekonomian.

Rp182 T Dana Daerah Mengendap

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

HINGGA akhir Maret 2021, sebanyak Rp182 triliun anggaran provinsi dan kabupaten/kota masih tersimpan di perbankan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kepala daerah segera membelanjakan APBD yang mereka miliki tersebut.

"Ini seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi masyarakat," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut Kepala Negara, dari sisi penawaran, sektor industri perlu terus didorong. Tenaga kerja harus mulai bekerja untuk bisa meningkatkan produktivitas. Tentu saja, semua itu dilakukan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Harus selalu kita ingat bahwa fondasi paling awal pemulihan ekonomi ialah pengendalian covid-19. Protokol kesehatan ketat harus dilakukan. Jangan ditawar-tawar mengenai hal ini," tegas Presiden.

Jokowi perlu mengingatkan seluruh kepala daerah terkait serapan anggaran mengingat tahun depan pemerintah masih mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dengan kata lain, program akselerasi perekonomian masih menjadi prioritas.

"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama bantuan sosial dan program padat karya untuk mendorong belanja masyarakat. Sisi permintaan ha-

Fokus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

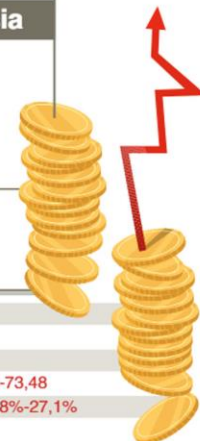
- Pemanfaatan *green economy* dan *blue economy*.
- Pertumbuhan ekonomi harus menjadi penyelesaian masalah dari tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan kapasitas UMKM.
- Mendorong belanja pemerintah untuk meningkatkan belanja masyarakat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah 2022

Hubungan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan Didukung oleh Tujuh Prioritas Nasional.

Indikator Rencana Kerja Pemerintah 2022

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2%-5,8%
- Tingkat pengangguran: 5,5%-6,2%
- Tingkat kemiskinan: 8,5%-9%
- Indeks Pembangunan Manusia: 73,44-73,48
- Penurunan emisi gas rumah kaca: 26,8%-27,1%
- Rasio gini: 0,376-0,378



Sumber: Setkab/Bappenas/Antara/Libang MI

rus diperbesar," tandas Jokowi.

Indikator RKP

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan, pada 2022 menjadi tahun pertama Indonesia lepas dari tekanan pandemi covid-19.

"Dibutuhkan pertumbuhan rata-rata 6% untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan lepas dari *middle income trap* sebelum 2045," papar Suharso dalam Musrenbangnas 2021 secara virtual tersebut.

Suharso menuturkan tantangan Indonesia tidak hanya pemulihan ekonomi, tetapi juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dimulai sejak sekarang.

Dia menyebutkan pemulihan ekonomi didukung berjalannya reformasi struk-

tural meliputi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, dan pendidikan.

Kemudian untuk keterampilan, pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 telah menentukan sasaran pembangunan terdiri atas beberapa indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi antara 5,2%-5,8% dan tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,2%.

Adapun tingkat kemiskinan 8,5%-9%, indeks pembangunan manusia 73,44-73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8%-27,1%, dan Rasio Gini 0,376-0,378.

"Selain itu, RKP 2022 juga memberikan penekanan pencapaian target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan," tandas Suharso. (Des/X-3)